

<div></div> <div>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</div>	<div>BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA</div>	1721 - A2
	<div>NOMOR : P3/</div> <div><input type="checkbox"/> Pembetulan Ke <input type="checkbox"/> Pembatalan</div>	<div>MASA PEROLEHAN PENGHASILAN</div> <div><div>0112</div><div>TAHUN PEROLEHAN PENGHASILAN</div><div>2025</div></div>

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN	
A.1 NPWP : 827545328115000	A.5 NAMA JABATAN : Guru Golongan III
A.2 NIP/ NRP : 199406052023212057	
A.3 NAMA : ADE DIANSARI SINAGA, S.Pd	A.6 JENIS KELAMIN : <input checked="" type="checkbox"/> LAKI - LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN
	A.7 NIK : 1209134506940003
A.4 PANGKAT/ GOLONGAN : IX / IX	A.8 STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP <div>TK / 00</div>

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21	
URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <div>x</div> 21-100-01 <div></div> 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO	
1. GAJI POKOK / PENSIUN	38.947.200
2. TUNJANGAN ISTRI	0
3. TUNJANGAN ANAK	0
4. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	3.924.000
6. TUNJANGAN BERAS	869.040
7. TUNJANGAN KHUSUS :	952
8. TUNJANGAN LAIN - LAIN	0
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 8)	43.741.192
PENGURANG	
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN	2.187.059
11. IURANG PENSIUN ATAU IURAN THT	0
12. ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DI BAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 S.D. 12)	2.187.059
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 -13)	41.554.133
15. PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	41.554.133
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54.000.000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	0
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DI POTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21. PPh PASAL 21 DI TANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DI POTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22. PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DI KREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19-20-21)	0
23. PPh PASAL 21 YANG TELAH DI POTONG DAN DI LUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	0
23a. PPh PASAL 21 DI POTONG	0
23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0
24. PPh PASAL 21 KURANG BAYAR /LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	0
24a. PPh PASAL 21 DI POTONG	0
24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT	C.01 <input type="checkbox"/> DIPINDAHKAN	C.02 <input type="checkbox"/> PINDAHAN	C.03 <input type="checkbox"/> BARU	C.04 <input type="checkbox"/> PENSIUN
---------------------	---	--	------------------------------------	---------------------------------------

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK	
D.1 NPWP Instansi Pemerintah	: <div>001808807115000</div>
D.2 Nama Instansi Pemerintah	: KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATU BARA
D.3 ID Sub Unit Organisasi	: _____
D.4 Tanggal	: <div>15012026</div>
D.5 NAMA PENANDATANGAN	: YUNAINI, S.Kom
D.6 Pernyataan Wajib Pajak	: Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemetongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik
<div></div>	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah